
PERAN INOVASI KOLABORATIF DALAM MENJAWAB TANTANGAN KEBIJAKAN PUBLIK

Heru Rochmansjah

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email: heru_rochmansjah@ipdn.ac.id

Abstract

This article claims that there is a need for new forms of innovation in the public sector because ways of innovating bureaucratic (closed) do not produce innovations that are able to answer the emerging policy challenges. Based on this shortcoming, this article defines a set of criteria, which must be met by an appropriate form of public sector innovation. This article shows that collaborative innovation meets these requirements because it opens an innovation cycle for each participant, and uses innovation resources across borders, overcomes cultural boundaries, and creates great social and political support for public sector innovation. This article highlights the risks and problems associated with collaborative innovation and that the concept must not be discarded for this reason because there are no suitable alternatives to overcome the challenges that arise and are ongoing. Finally, this article suggests the capacity, which the government needs to develop to successfully implement collaborative innovation. However, because research on innovation in the public sector is rather thin, this article suggests a map for further research to prove the role of collaborative innovation in the public sector.

Keywords: Collaborative, Innovation, Public Sector.

A. PENDAHULUAN

Mereka yang kurang peduli dengan studi dan praktik inovasi di sektor publik dapat mengklaim bahwa inovasi di sektor publik adalah sebuah kontrakdisi. Namun, kesimpulan itu adalah kekeliruan jika orang mempertimbangkan banyak inovasi, yang diproduksi sektor publik. Beberapa inovasi yang paling terkenal adalah Universitas Terbuka dan Strategi Literasi Nasional di Inggris. Pemenang penghargaan tahunan dari program Inovasi Pemerintah Amerika Ford Foundation, yang dikelola oleh Kennedy School of Government Universitas Harvard, menjadi contoh lain di AS. Mungkin ada berbagai contoh inovasi sektor publik dari negara lain, yang dapat membuktikan bahwa inovasi dan sektor publik tidak saling eksklusif.

Namun, beberapa profesional dan akademisi mengklaim bahwa sektor publik perlu menemukan cara baru yang radikal untuk berinovasi. Alasan sederhana di balik klaim ini adalah bahwa inovasi sektor publik saat ini tidak akan menghasilkan inovasi yang diperlukan untuk mengatasi tantangan radikal saat ini seperti perubahan iklim, masyarakat lanjut usia, obesitas dan krisis keuangan (Bommert, 2010). Para akademisi dan profesional ini mengusulkan bentuk inovasi baru, yang disebut "inovasi kolaboratif", sebagai obat untuk masalah inovasi yang diduga dari sektor publik. Orang mungkin siap menerima bahwa sektor publik menghadapi tantangan yang kompleks, yang tidak terpenuhi. Namun, orang mungkin kurang siap menerima bahwa bentuk inovasi yang berbeda merupakan alternatif yang meyakinkan. Alasan ketidakjelasan ini adalah bahwa penelitian tentang inovasi sektor publik agak tipis dan tingkat konseptualisasi rendah (Sorensen, 2014).

Dalam lingkungan penelitian ini sulit untuk secara jelas menetapkan apa yang berbeda tentang bentuk alternatif inovasi dan untuk mengklaim bahwa ia memiliki karakteristik yang membuatnya lebih cocok. dari bentuk saat ini. Agar persuasif, proposal untuk inovasi kolaboratif perlu menawarkan jawaban yang jelas atas apa yang disebut Nishiyama (1971) sebagai masalah stok seperti: apakah ada kebutuhan untuk perubahan? Apakah proposal itu bisa diterapkan dalam teori? Apakah ini solusi terbaik?.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Awal Mula Kolaboratif Inovasi

Inovasi kolaboratif biasanya dikaitkan dengan konsep *Networked Government*. Menurut Stewart (2014), "konsep *Networked Government* tidak hanya mencakup koordinasi yang efektif antar organisasi pemerintah tetapi juga kemungkinan integrasi baik untuk organisasi nirlaba dan sektor nirlaba ke dalam sistem produksi yang dirancang untuk mencapai tujuan publik". Definisi longgar dari jaringan pemerintah ini menggarisbawahi gagasan inovasi kolaboratif dalam arti bahwa aset berbagai pelaku lintas batas organisasi harus digunakan.

Rainey (2008), di sisi lain menekankan nilai manajemen jaringan untuk memungkinkan pemerintah menemukan solusi untuk masalah yang kompleks. Menurut Stewart pekerjaan manajemen publik kontemporer adalah "terperangkap dalam tantangan simbolis-analitik menerapkan jenis data, informasi, dan pengetahuan tertentu untuk situasi yang kompleks". Pendekatan jaringan membantu untuk mengatasi tantangan penyelesaian masalah ini karena "banyak pihak berarti banyak alternatif untuk menyarankan dan mempertimbangkan, lebih banyak informasi tersedia untuk semua untuk digunakan, dan sistem keputusan yang kurang terikat oleh kelemahan pemikiran individu "Berbeda dengan Stewart, Stewart menunjukkan nilai yang dimainkan manajemen jaringan dalam tahap pembentukan ide dan seleksi. Stewart mengkategorikan jenis jaringan ini sebagai "jaringan informasi". Selain manfaat dari manajemen jaringan untuk generasi ide Stewart juga menyajikan bukti untuk nilainya dalam implementasi dan difusi. Dibandingkan dengan proposal inovasi kolaboratif, Stewart hanya berfokus pada sejumlah kecil "pihak".

Durmusoglu (2004), menggambarkan pembukaan siklus inovasi sebagai "*Open Innovation*". *Open Innovation* berarti, "bahwa ide-ide berharga dapat datang dari dalam atau dari luar perusahaan dan dapat pergi ke bentuk pasar di dalam atau di luar perusahaan juga". Durmusoglu berpendapat bahwa era inovasi tertutup, dalam batas-batas perusahaan, sudah lewat, sejak monopoli sains, yang dimiliki oleh segelintir perusahaan, dipecah karena dua sebab. Pertama, monopoli sains sering bertepatan dengan monopoli industri, yang utamanya dipisahkan oleh peraturan antimonopoli dan sains kedua menjadi lebih tersebar di antara perusahaan, pelanggan, pemasok, universitas, laboratorium nasional, industri, konsorsium, dan perusahaan baru (Durmusoglu, 2004). Dari keadaan ini Durmusoglu menyimpulkan bahwa perusahaan perlu membuka proses inovasi mereka untuk secara sistematis mencari ide-ide dari luar dan juga untuk meningkatkan pengetahuan dari dalam mereka secara dari luar tersebut. Oleh karena

itu, perusahaan dapat memanfaatkan sejumlah besar aset inovatif yang didistribusikan secara luas di dalam dan di luar perusahaan. Oleh karena itu, siklus inovasi harus dibagi di antara peserta yang berbeda sesuai dengan ketersediaan aset inovasi untuk menyelesaikan masalah inovasi.

2. Kebutuhan Bentuk Baru dalam Inovasi Sektor Publik

Langkah pertama untuk menyelidiki klaim apakah inovasi kolaboratif adalah bentuk inovasi yang sesuai di sektor publik adalah menganalisis apakah pada umumnya ada kebutuhan untuk bentuk baru inovasi sektor publik. Pertanyaan panduan pertama adalah apakah ada tantangan sektor publik yang tidak terpenuhi. Bommert (2010), mengkategorikan tantangan ini menjadi yang muncul dan persisten. Tantangan yang muncul adalah perubahan iklim, penuaan masyarakat, peningkatan kondisi kesehatan jangka panjang dan lain-lain. Di antara masalah yang terus-menerus adalah kesehatan mental, kejahatan dan ketertiban sosial; dan alkoholisme.

Para pendukung bentuk-bentuk inovasi baru di sektor publik menambahkan elemen urgensi pada klaim mereka dengan menyatakan bahwa krisis keuangan saat ini memperburuk tantangan-tantangan ini. Krisis keuangan menimbulkan batasan anggaran dan memaksa pemerintah untuk mencari peluang baru yang lebih gampang untuk menanggapi masalah-masalah kemasyarakatan baik di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan.

Posner (2009), menunjukkan karakteristik lain dari tantangan ini, yang membuatnya sulit bagi pemerintah untuk menemukan solusi yang tepat. Menurut Posner (2009) masalah ini melintasi batas (lokal, regional, nasional dan internasional) tetapi tanggapan pemerintah sering terbatas pada batas dan oleh karena itu tidak banyak membantu dalam memenuhi tantangan.

3. Defisiensi Inovasi Sektor Publik

Ada banyak penjelasan untuk kekurangan inovasi sektor publik dalam mendukung bentuk-bentuk inovasi baru di sektor publik. Namun, penjelasan ini sering dibentuk untuk mempromosikan kasus tertentu untuk inovasi dan tetap kabur atau tidak lengkap. Penjelasan dengan gaya "sekarang lebih dari sebelumnya, pemerintah perlu merangkul pendekatan inovatif untuk masalah yang menakutkan. Alasannya sederhana: praktik yang ada tidak akan mencukupi".

Collm & Schedler (2012), mengklaim bahwa pemerintah memiliki masalah dalam mengelola siklus inovasi. Mereka menggarisbawahi bahwa pemerintah lemah dalam menghasilkan ide, seleksi, implementasi dan difusi. Selain itu, pemerintah tidak berinovasi secara strategis dalam arti bahwa ia "cenderung untuk mendekati inovasi sebagai perubahan "satu kali", menggunakan pendekatan "big bang" alih-alih serangkaian pendekatan baru yang membentuk proses yang lebih luas".

Banyak profesional dan ahli menyalahkan sifat birokrasi pemerintah yang dinyatakan dalam pembatasan organisasi dan budaya untuk kelemahan dari siklus inovasi. Menurut sebuah studi oleh NAO "Inovasi Lintas Pemerintahan Pusat" (2008), siklus inovasi selalu berkisar pada manajemen puncak pada sebuah perusahaan atau organisasi dan tidak ada atau hanya beberapa integrasi aktor-aktor lain (misalnya: sektor swasta, staf garis depan, warga negara dan sektor ketiga). Karakteristik pemerintah birokrasi ini tidak memperdulikan potensi inovasi, yang ada pada berbagai level organisasi dan di seluruh asrama untuk memicu siklus inovasi. Oleh karena itu, ide yang dihasilkan baik secara kuantitas dan kualitas, dipilih, diterapkan dan disebarkan berkurang. Selain itu, penutupan inovasi di sektor publik mengurangi transparansi, kepercayaan dan tekad untuk melakukan inovasi, sehingga melemahkan implementasi dan penyebaran inovasi.

Kurangnya dukungan dalam lingkungan sosial-politik juga dapat berfungsi sebagai penjelasan untuk pendekatan "satu kali" dan "big-bang" terhadap inovasi. Inovasi-inovasi ini sebagian besar terjadi sebagai respons terhadap ancaman yang

akan terjadi. Dalam kasus-kasus tersebut, kesadaran publik, media, dan dukungan politik menciptakan lingkungan di mana pengambilan risiko disahkan, kepemimpinan dan pendanaan tersedia dan eksperimen dimungkinkan. Sebaliknya, jika salah satu dari ketiganya hilang, jendela peluang untuk inovasi menyempit dan siklus inovasi melambat atau rusak.

Tentu saja, penjelasan tentang kekurangan inovasi sektor publik ini tidak lengkap. Akan bervariasi dalam yurisdiksi dan jenis pemerintahan. Selain itu, tergantung pada perbedaan-perbedaan ini kelemahan siklus inovasi dan penjelasan yang sesuai mungkin berbeda. Terlepas dari kualifikasi ini, bagian artikel ini menunjukkan bahwa pemerintah menghadapi tantangan dalam mengelola siklus inovasi dan menciptakan inovasi yang tepat dari segi kualitas dan kuantitas untuk menjawab hambatan yang timbul dan persisten. Lebih jauh, bagian ini menjelaskan kekurangan-kekurangan ini dalam hal sifat birokrasi pemerintah, yaitu aspek organisasi dan budaya yang membatasi.

4. Inovasi Kolaboratif Sebagai Bentuk Inovasi yang Cocok di Sektor Publik

Berdasarkan temuan dari bagian sebelumnya saya kira-kira dapat mendefinisikan kriteria, yang perlu dipenuhi oleh inovasi kolaboratif untuk dianggap cocok dari inovasi sektor publik. Pada bagian sebelumnya saya menggambarkan penyebab utama dari kurangnya inovasi sektor publik. Kriteria, yang secara logis mengikuti dari hubungan itu, adalah dapatkah inovasi membantu menghilangkan bidang organisasi dan budaya yang menghambat inovasi pada sektor publik. Selain itu, inovasi kolaboratif membutuhkan lingkungan sosial-politik yang lebih luas yang dapat memengaruhi inovasi di sektor publik.

Untuk mengatasi keterbatasan organisasi, inovasi kolaboratif memerlukan (1) untuk membuka siklus inovasi untuk aset inovasi didalam dan diluar. Mempertimbangkan kendala budaya, kebutuhan inovasi kolaboratif (2) untuk mempromosikan pengambilan risiko. Dalam konteks yang lebih luas, inovasi

kolaboratif membutuhkan (3) untuk meningkatkan sikap positif terhadap inovasi dan pengambilan risiko di sektor publik dalam lingkungan sosial-politik. Jika kausalitas terpenuhi, itu akan meningkatkan unsur-unsur siklus inovasi dan meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi di sektor publik.

5. Mengevaluasi Inovasi Kolaboratif

Menurut rekomendasi kolaborasi inovasi, pemerintah harus menggunakan berbagai aset inovasi baik didalam dan luar organisasi, dan juga harus menggunakan aset inovasi didalam secara eksternal. Dengan membuka siklus inovasi dan memungkinkan aset inovasi mengalir melintasi batas internal dan eksternal, inovasi kolaboratif dapat memenuhi kriteria pertama. Akibatnya, proses inovasi terbuka memiliki potensi untuk meningkatkan elemen-elemen siklus inovasi dengan berbagai cara.

Generasi ide diperkuat, karena pemerintah dapat menggunakan "berbagai pengetahuan, (kreativitas) dan keahlian yang bersifat lokal dan global, awam dan profesional" (Fung, 2008) untuk menemukan solusi yang lebih baik untuk kebutuhan yang tidak terpenuhi. Seleksi ide bisa ditingkatkan. Salah satu caranya adalah bahwa pemerintah memasukkan lebih banyak aktor dalam proses seleksi dan dengan demikian meningkatkan kemungkinan untuk mengatasi "*groupthink*" (Tetlock, 1979), yang muncul dalam kelompok pengambilan keputusan kecil.

Implementasi dan difusi ide dilayani. Penyebab utama kenapa implementasi dan difusi didukung adalah bahwa pelaku yang ikut terlibat dalam pembuatan ide dan/atau proses seleksi lebih mungkin untuk menerima dan mempromosikan inovasi, karena memiliki kepemilikan dan tanggung jawab. Selain itu, berdasarkan masalah inovasi dan distribusi aset inovasi, pelaku eksternal mungkin lebih baik dalam menerapkan dan menyebar gagasan. Inovasi kolaboratif memberi pemerintah peluang untuk menggeser tempat implementasi dan difusi kepada pelaku yang cakap dan sehingga dapat memperkuat unsur implementasi dan difusi dari siklus

inovasi. Mempercayakan pelaku luar dengan implementasi dan difusi juga memungkinkan tingkat pengambilan risiko yang lebih besar diperlukan untuk implementasi dan difusi. Aktor eksternal lebih kecil kemungkinannya dituduh menghambur-hamburkan uang pembayar pajak dan karenanya menikmati lebih banyak ruang untuk pengambilan risiko (kepemimpinan yang mendukung, pendanaan, dan eksperimen). Dengan demikian dengan membuka siklus inovasi, pemerintah dapat menemukan cara untuk menghindari hambatan budaya terhadap inovasi sektor publik dan meningkatkan implementasi dan difusi.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode tinjauan literatur. Menurut Sugiyono (2005), penelitian kualitatif bertujuan untuk sepenuhnya memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dan menggambarkan mereka dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteksnya. Terutama alami, dan gunakan berbagai metode alami.

Sementara Burhan Bungin menjelaskan "Metode literatur adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data histories". Sedangkan Sugiyono menyatakan bahwa Literatur merupakan catatan dari sebuah kejadian yang sudah terjadi, yang mana catatan itu bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya seseorang". Pada penelitian ini penggalan studi literatur yang berhubungan dengan Inovasi kolaboratif yang berbubungan pada kebijakan publik.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tidak ada atau hampir tidak ada penelitian tentang risiko inovasi kolaboratif di sektor publik. Namun, ini tidak berarti bahwa seseorang tidak dapat membuat kesimpulan tentang risiko dan masalah dari teori terkait. Pada bagian ini saya

mencoba untuk mendapatkan risiko dari tata kelola jaringan. Berkenaan dengan tata kelola jaringan saya telah menunjukkan di bagian 1 bahwa ada hubungan antara tata kelola jaringan dan inovasi kolaboratif dalam arti bahwa keduanya memanfaatkan berbagai aktor internal dan eksternal. Dalam aspek ini inovasi kolaboratif menghadapi masalah yang sama seperti tata kelola jaringan. Salah satu risiko dalam tata kelola jaringan adalah "masalah tujuan publik" (Fung, 2008).

Menurut Fung kelompok-kelompok kepentingan yang berperan serta membuat kolaboratif dapat "membajak" dalam menentukan sebuah keputusan, lebih mengedepankan keinginan dan minat mereka dan merusak pengejaran nilai publik. Masalah yang sama ada untuk inovasi kolaboratif. Pada prinsipnya aktor mempunyai kebolehdjian untuk merekayasa elemen-elemen siklus inovasi agar dapat mengerahkan minat khusus mereka atas tujuan berinovasi nilai publik.

Masalah lain yang terkait dengan pembagian peran dalam tata kelola jaringan adalah distribusi akuntabilitas (Sirianni, 2009). Sirianni mengangkat isu mengenai tanggung jawab siapa atas produksi nilai publik apabila produksi itu kolaboratif serta "lingkungan akuntabilitas tidak begitu terpecah". Karena inovasi kolaboratif juga membutuhkan peran masing-masing berdasarkan kecocokan antara masalah dengan aset inovasi, masalah yang sama muncul. Dalam konteks ini orang dapat membayangkan pertanyaan seperti: apakah pemerintah bertanggung jawab atas unsur-unsur siklus inovasi, yang tidak dikelola?. Pengalihan wewenang dan pertanggungjawaban memprovokasi untaian perkara konstitusional pada demokrasi tak langsung di mana seseorang yang dipilih biasanya memiliki otorisasi dan bertanggung jawab pada tindakan mereka di bawah otoritas itu. Namun, masalah-masalah penting ini perlu ditanggihkan dalam artikel ini dan perlu diteliti lebih lanjut.

Alternatif untuk inovasi kolaboratif harus memenuhi kondisi yang sama untuk menjadi bentuk inovasi sektor publik baru yang sesuai. Namun, untuk menjadi alternatif pilihan untuk inovasi kolaboratif mereka perlu memenuhi kriteria lebih meyakinkan atau melibatkan risiko dan masalah yang lebih sedikit.

Berdasarkan kriteria ini, bentuk tertutup dari inovasi sektor publik, bukan merupakan alternatif. Mereka tidak memenuhi kriteria pertama untuk membuka proses inovasi, menggunakan potensi inovasi yang ada sehingga menghasilkan kuantitas dan kualitas inovasi untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Bahkan berkenaan dengan dua kriteria lainnya (meningkatkan pengambilan risiko dan mempengaruhi lingkungan sosial-politik) bentuk tertutup dari inovasi sektor publik adalah alasan mengapa kriteria ini tidak terpenuhi dan karena itu tidak dapat menjadi alternatif. Akibatnya, bentuk-bentuk inovasi sektor publik yang tertutup tidak akan menjadi alternatif yang cocok untuk memenuhi kebutuhan inovasi. Tentu saja, orang dapat berargumen bahwa bentuk-bentuk ini mengandung risiko dan masalah yang lebih sedikit mengenai wewenang dan akuntabilitas. Orang mungkin bahkan berpendapat bahwa mereka memiliki biaya yang lebih rendah (risiko uang dan biaya koordinasi). Tetapi bahkan jika bentuk tertutup dari inovasi sektor publik mengurangi risiko ini, mereka menimbulkan risiko dan masalah mengenai transparansi, legitimasi, kepercayaan, dan daya tanggap (OECD, 2009).

Rekomendasi ini mengabaikan kapasitas abstrak dan generik, yang perlu dikembangkan pemerintah terlepas dari bentuk konkret inovasi kolaboratif. Pertama, pemerintah disarankan menambah kapasitas untuk menelusuri keperluan inovasinya. Keperluan-keperluan ini dapat dikenali di internal atau eksternal pemerintahan dan up to down atau down to up. Kedua, untuk mengidentifikasi sumber daya inovasi, pemerintah perlu membangun kemampuan untuk melihat seluruh dan di luar organisasi. Ketiga, setelah mengidentifikasi sumber daya yang inovatif, pemerintah perlu dapat memberikan insentif dan mendorong peserta untuk menggunakan sumber daya mereka. Pada akhirnya, pemerintah harus bisa mengkoordinasikan implementasi segala potensi untuk inovasi nilai publik.

Inovasi kolaboratif membutuhkan kemampuan lain, yang terkait dengan transfer kekuasaan atau "kekuatan pengambilan keputusan" untuk menentukan nilai publik dari inovasi. Wu, dkk., (2010) berpendapat bahwa aktor eksternal akan mengklaim hak keputusan untuk menentukan, ide untuk nilai publik mana yang dihasilkan, diseleksi, diimplementasikan, dan disebarluaskan sebagai ganti sumber

daya inovasi mereka. Seperti yang ditunjukkan pada bagian empat, alasan yang sama dapat diterapkan pada inovasi kolaboratif. Orang dapat berargumen bahwa ini bukan masalah dan pemerintah dapat mengendalikan aktor kolaboratif melalui kontrak dan dengan demikian mengatasi konflik agen utama. Namun, kontrak tidak pernah bisa sepenuhnya lengkap dan sulit dan mahal untuk merancang kontrak, semakin besar jumlah dan keragaman aktor yang berpartisipasi dalam upaya inovasi kolaboratif (Hueth & Marcoul, 2003). Oleh sebab itu, pemerintah tidak bisa mengontrol penuh inovasi nilai publik dan perlu mengembangkan nilai dan langkah untuk memutuskan pertukaran antara kewenangan dan aset inovasi diluar.

Namun, tidak cukup bahwa pemerintah mengembangkan kapasitas untuk secara hati-hati mentransfer wewenang. Jika pemerintah meninggalkan kekuatannya dan mengendalikan inovasi nilai publik, transfer kekuasaan dalam inovasi kolaboratif akan menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab atas inovasi nilai publik. Sirianni (2009) mengusulkan sistem "akuntabilitas timbal balik" untuk tata kelola kolaboratif. Sirianni berpendapat untuk kasus partisipasi warga negara bahwa warga negara harus "setuju untuk bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan mereka" (Sirianni, 2009) sebagai imbalan untuk menerima hak keputusan. Mempertimbangkan pengaruh yang biasanya dimiliki oleh para aktor eksternal dalam inovasi kolaboratif, akuntabilitas timbal balik tampaknya menjadi cara yang masuk akal untuk mengaitkan kekuatan pengambilan keputusan dengan akuntabilitas. Akibatnya, pemerintah perlu membangun kapasitas untuk merancang akuntabilitas timbal balik terkait dengan alokasi kekuatan pengambilan keputusan.

Akan tetapi, akuntabilitas perlu dilandasi oleh sejumlah syarat di mana para aktor bertanggung jawab relatif terhadap peran mereka dalam inovasi kolaboratif. Wu dkk., (2010) mengusulkan kerangka kerja untuk menilai hasil tata kelola berjejaring terhadap keadilan, keadilan, dan pembangunan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas. Nilai-nilai ini relevan terlepas dari apakah nilai publik dihasilkan melalui jaringan atau diinovasi secara kolaboratif. Oleh karena itu, ini dapat berfungsi sebagai kerangka kerja yang sesuai untuk mengevaluasi inovasi sektor publik kolaboratif dan mengukur akuntabilitas.

Meringkas bagian ini saya dapat mengatakan bahwa pemerintah butuh menambah sejumlah kemampuan untuk menerapkan inovasi kolaboratif. Orang dapat mengkritik bahwa rekomendasi ini tidak lengkap dan terlalu abstrak untuk praktis. Rekomendasi bersifat sementara dan berdasarkan pada asumsi dan hasil dalam lingkup artikel ini dan oleh karena itu terbatas. Apalagi mereka abstrak. Namun, tingkat abstrak ini memungkinkan penerapan generik terlepas dari bentuk khusus dari inovasi kolaboratif yang diadopsi.

E. KESIMPULAN

Tujuan artikel ini adalah untuk menemukan jawaban untuk pertanyaan penelitian apakah inovasi kolaboratif adalah bentuk baru yang sesuai dari inovasi sektor publik. Dalam batas-batas artikel ini saya telah menunjukkan bahwa inovasi kolaboratif adalah bentuk baru dari inovasi sektor publik. Ini sesuai karena memungkinkan kita untuk menyelesaikan masalah yang tidak teratasi, yang tidak dapat ditawarkan oleh bentuk inovasi sektor publik birokrasi. Alasan utama mengapa inovasi kolaboratif lebih cocok untuk menyelesaikan masalah yang muncul terus-menerus adalah karena dapat memberikan akses masuk kedalam siklus inovasi pada bermacam pelaku dan memanfaatkan potensi inovasi tak terbatas, mengalahkan batasan budaya dan menghasilkan dukungan sosial-politik yang besar untuk inovasi publik. Sebagai konsekuensi dari efek ini, inovasi kolaboratif mempunyai kemampuan untuk meningkatkan generasi ide, pilihan, penerapan, dan difusi.

Namun, inovasi kolaboratif tidak bebas dari tantangan. Pembukaan siklus inovasi mengharuskan pemerintah membagi wewenangnya untuk menentukan nilai publik dari inovasi. Pengalihan wewenang ini menimbulkan masalah akuntabilitas dalam sistem konstitusi di mana mereka yang memiliki wewenang juga bertanggung jawab. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu mengembangkan kapasitas untuk melakukan trade off antara otoritas dan aset inovasi dan membangun sistem akuntabilitas timbal balik. Saya membuat

rekomendasi abstrak dalam bentuk "apa yang perlu dipertanggungjawabkan " alih-alih memberikan pedoman yang tepat untuk situasi konkret atau saran normatif.

Terlepas dari kenyataan bahwa artikel ini menunjukkan bahwa inovasi kolaboratif adalah bentuk yang sesuai dari inovasi sektor publik dan menunjukkan kapasitas, yang perlu dikembangkan untuk menerapkan bentuk inovasi ini, ia memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan ini berfungsi sebagai garis besar untuk agenda penelitian di masa depan untuk topik, konsep dan bukti empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- Bommert, B. (2010). Collaborative innovation in the public sector. *International Public Management Review*, 11(1), 15-33.
- Bugin, B. (2008). *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Collm, A., & Schedler, K. (2012). Managing Crowd Innovation in Public Administration. *International Public Management Review*, 13(2), 1-18.
- Durmusoglu, S. S. (2004). Open innovation: the new imperative for creating and profiting from technology. *European Journal of Innovation Management*.
- Fung, A. (2008). *Citizen Participation in Government Innovations*. In Borins, Sandford, ed., *Innovations in Government-Research, Recognition and Replication*. Washington DC: Brookings Institution Press.
- Hueth, B., & Marcoul, P. (2003). An essay on cooperative bargaining in US agricultural markets. *Journal of Agricultural & Food Industrial Organization*, 1(1).
- National Audit Office. (2008). *Innovation Across Central Government*. The Stationary Office
- Nishiyama, K. (1971). *Interpersonal persuasion in a vertical society-the case of Japan*.
- OECD. (2009). *Focus on Citizens-Public Engagement for Better Policy and Services*. OECD.
- Posner, P. (2009). *Networks in the shadow of government: Keys to high performance government*.
- Rainey, H. G. (2008). *Managing within Networks: Adding Value to Public Organizations*.
- Sirianni, Carmen. 2009. *Investing in Democracy: Engaging citizens in collaborative governance*. Washington DC: Brookings Institution Press
- Sørensen, E. (2014, September). The metagovernance of public innovation in governance networks. In *Policy and Politics Conference in Bristol* (pp. 16-17).

- Stewart, J. (2014). Implementing an innovative public sector program. *International Journal of Public Sector Management*.
- Sugiono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tetlock, P. E. (1979). Identifying victims of groupthink from public statements of decision makers. *Journal of Personality and Social Psychology*, 37(8), 1314.
- Wu, J., Ma, L., & Yang, Y. (2010, February). Innovations in contemporary Chinese public sectors: Myths and realities. In *symposium on 'Reform and Transition in Public Administration Theory and Practice in Greater China'* held on (pp. 4-6).